

PENENTUAN ANGGARAN BOS BERDASARKAN JUMLAH SISWA TERHADAP PELAYANAN PEMBELAJARAN YANG BERKEADILAN DI SEKOLAH DASAR

Maman Rusmana & Agus Hamdani

STKIP Garut, Jl. Pahlawan Sukagalih No. 32, Sukagalih Tarogong Kidul Kabupaten Garut
e-mail: mmn_c16@yahoo.com

Abstract: Determination of Magnitude Budget for School Operational Assistance Service. This study aims to determine the effectiveness of the administration of the School Operational Assistance at primary school level to the learning process equitable services. This research uses descriptive analysis method, which analyzes the impact of policies on the operational Educational Assistance funds to service learning at the primary school level. The population in this study is an elementary school in Garut, with a sampling technique using random sampling with the cluster system of the districts. Schools which become a sample of 30% of the number of schools of the area sampled tersebut. Data was collected by questionnaire and interview with the school principal. The results of this study mmberikan information that policy budget amounts oprasional using variable or calculation basis only by many students, mmberikan effects of gaps in service in organizing learning for learners, it is necessary for the new policy to consider adding another variable in support for equal opportunity for organized learning learners.

Keywords: operational assistance, the learning process, fair, quality

Abstrak: Penentuan Besaran Anggaran BOS terhadap Pelayanan Pembelajaran yang Berkeadilan pada Sekolah Dasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tingkat sekolah dasar terhadap pelayanan proses pembelajaran yang berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menganalisis dampak kebijakan pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah terhadap pelayanan pembelajaran pada tingkat sekolah dasar. Adapun populasi pada penelitian ini adalah sekolah dasar di Kabupaten Garut, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *random sampling* dengan sistem *cluster* wilayah kecamatan. Sekolah yang menjadi sampel sebanyak 30% dari jumlah sekolah dari wilayah yang dijadikan sampel tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan angket dan wawancara terhadap kepala sekolah. Hasil penelitian ini mmberikan informasi bahwa dengan kebijakan besaran anggaran oprasional menggunakan variable atau dasar perhitungan hanya berdasarkan banyak siswa, mmberikan efek kesenjangan dalam pelayanan pada penyelenggaraan pembelajaran bagi peserta didik, untuk itu diperlukan adanya kebijakan baru untuk dipertimbangkan menambah variable lain dalam mendukung pemerataan pelayanan penyelenggaraan pembelajaran peserta didik.

Kata kunci: bantuan operasional sekolah, proses belajar, pembelajaran

PENDAHULUAN

Program BOS pada jenjang pendidikan dasar ditujukan terutama untuk pemerataan dan perluasan akses dalam pelayanan pendidikan, yang sampai saat ini masih banyak masyarakat miskin yang tidak mampu mengeluarkan biaya pendidikan untuk anggota keluarganya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Na-

sional yang menjelaskan pendanaan pendidikan yaitu pada Pasal 11 Ayat 2 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun. Dengan adanya program BOS diharapkan seluruh keluarga miskin yang memiliki anak usia sekolah khususnya 7-15 tahun dapat menyekolahkan anaknya karena mereka tidak lagi memikirkan biaya sekolah atau lebih

populer dengan sebutan sekolah gratis. Dari manapun sumber dana pendidikan dan sistem penganggaran yang digunakan biaya tersebut tidak hanya memperhatikan saja pemerataan, tapi juga harus berdampak pada pelayanan pembelajaran yang berbasis mutu/kualitas. Untuk mengukur dampak biaya pendidikan terhadap mutu proses dan hasil belajar terdapat asumsi sebagai berikut. Pertama, berangsur-angsur dikembangkan kebijakan yang tidak membedakan sekolah negeri dan swasta. Kedua, bagi sekolah, baik negeri maupun swasta yang dana masyarakatnya cukup besar, pemerintah tidak perlu memberikan subsidi yang sama dengan sekolah yang akumulasi dana masyarakatnya kecil. Ketiga, perlu dicari varian-varian yang dapat dipakai untuk mendinamisasikan

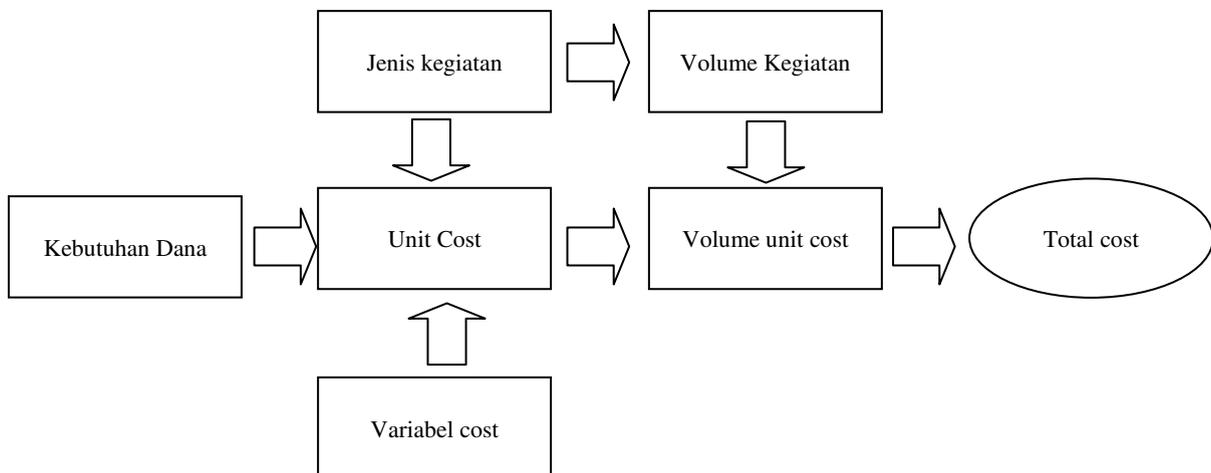
pendanaan pendidikan yang mengarah ke satu pola. Keempat, subsidi parsial dipakai untuk menolong institusi yang lemah, misalnya dengan diberikan bantuan gedung, guru atau bantuan lain yang memberi efek ganda. (Arifin, 2008).

Penentuan besaran dana Bantuan Operasional Sekolah pada satuan pendidikan yang berlaku saat ini didasarkan pada Kepmendiknas Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia. Besaran BOS persiswa pada tahun 2009 sebesar Rp 580.000,00 per tahun, sedangkan untuk tahun anggaran 2015 sebesar Rp 800.000,00 persiswa pertahun. Penentuan besaran anggaran pertahun digambarkan sebagai berikut.

**PROSES STANDAR BIAYA OPERASI NONPERSONALIA
(BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH) SD/MI
Lampiran I. Per Kemendiknas Nomor. 69 Tahun 2019**



Gambar 1. Sistem Penentuan Besaran BOS pada Satuan Pendidikan



Gambar 2. Formulasi Sistem Penentuan Anggaran pada Satuan Pendidikan Berdasarkan Kompleksitas Kegiatan

Dengan perhitungan tersebut dianggap bahwa jumlah siswa di sekolah dianggap sama atau mendekati, padahal kenyataannya setiap sekolah memiliki jumlah siswa yang berbeda, dengan komponen kegiatan yang sama. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Fatah (2008) bahwa dalam pembiayaan sekolah tidak ada pendekatan tunggal dan yang paling baik untuk pembiayaan semua sekolah karena kondisi tiap sekolah berbeda. Jadi, dalam hal ini tidak mungkin dalam menghitung anggaran sekolah disamaratakan berdasarkan perhitungan nasional. Perhitungan anggaran berdasarkan kompleksitas kegiatan dalam satu organisasi/lembaga dapat digambarkan berikut.

Bastian (2006) mengartikan pembiayaan pendidikan sebagai upaya pengumpulan dana untuk membiayai operasional dalam sektor pendidikan. Model pembiayaan sekolah terdapat dua dimensi pokok yaitu dimensi alokasi biaya dan dimensi penghasilan (revenue). Dimensi alokasi biaya terkait dengan target populasi yang disesuaikan dengan program, pelayanan dan kelengkapan fasilitas untuk mencapai populasi. Dari pendapat di atas bahwa penentuan anggaran pada suatu lembaga khususnya satuan pendidikan harus disesuaikan dengan jenis program dan besar volume yang terdapat pada setiap program. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dampak dari kebijakan penentuan anggaran BOS yang hanya menggunakan variabel banyak siswa terhadap pelayanan pelaksanaan pembelajaran bagi peserta didik yang berkeadilan untuk semua satuan pendidikan.

METODE

Metode Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analisis* yaitu menganalisis data untuk mendapatkan informasi yang ada kaitannya dengan penentuan besarnya biaya operasional sekolah pada tingkat sekolah dasar. Untuk mendapatkan data tersebut dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama menganalisis dokumen, yaitu menganalisis kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini dan data keadaan sekolah. Tahap kedua, penelitian dilakukan dengan survey dengan teknik pengambilan sampel *random sampling* melalui sistem wilayah. Populasi meliputi sekolah dasar di Kabupaten Garut yang berjumlah 42 kecamatan dengan pengambilan sampel sebanyak 11 kecamatan, dan setiap kecamatan diambil 8-12 sekolah dasar. Teknik yang digunakan dalam memperoleh data/informasi dari responden dengan menggunakan angket dan wawancara. Responden utama adalah kepala sekolah, sedangkan responden penunjang pengawas dan kepala UPTD pendidikan dasar.

Angket berisi pertanyaan yang jawabannya sudah tersedia, kepala sekolah tinggal memilih jawaban yang tersedia dan juga menambah jawaban yang dianggap benar tapi belum dianggap sempurna. Di awal lembar pertanyaan tersebut juga disediakan format/daftar isian yang menyangkut data kuantitatif sekolah yang ada kaitannya dengan pembiayaan operasional sekolah. Pengisian/pengerjaan angket secara bersama-sama, yang sebelumnya diberi arahan dulu cara mengisi angket tersebut oleh tim peneliti. Teknik wawancara dilakukan secara individu, dan informasi yang diperoleh adalah tingkat pelayanan terhadap proses pembelajaran pada tiap-tiap sekolah, dengan memanfaatkan dana bantuan operasional sekolah yang diterima. Wawancara juga untuk mengetahui mana komponen yang menjadi prioritas anggaran dan mana komponen yang banyak menjadi korban atau anggarannya tidak terpenuhi. Sekolah yang sasaran penelitian dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok Kategori 1, sekolah yang memiliki peserta didik tidak memenuhi standar, sedangkan kelompok 2 sekolah dasar yang memiliki peserta didik memenuhi standar. Dari tiap kelompok kategori tersebut dilihat rata-rata pelayanan yang diberikan terhadap pelayanan pembelajaran dengan dana bantuan operasional yang diterima.

Penggumpulan data dengan menggunakan rubrik *performance assessment* dalam melihat sejauh mana penyusunan alokasi anggaran dengan menggunakan sistem penganggaran orientasi program (*programming Budgetting System*) di sekolah. Secara ringkas alur penelitian sebagai berikut ini. Tahap pertama merupakan penelitian pendahuluan dalam rangka dan perencanaan meliputi tahap (a) studi pendahuluan, (b) identifikasi masalah, (c) analisis masalah, (d) studi persiapan pustaka. Tahap kedua merupakan rancangan program yang meliputi tahap (a) analisis kebijakan pemerintah dalam menentukan besaran BOS di Sekolah, (b) analisis data sekunder, (c) analisis penyusunan program/anggaran di sekolah (*sampling*), (d) analisis dampak kebijakan terhadap pelayanan pembelajaran, (e) analisis Perhitungan unit cost.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Standar banyaknya siswa pada setiap kelas berdasarkan Peraturan Kemendiknas Nomor 69 Tahun 2009 sebanyak 28 orang. Hal ini diharapkan tidak ada siswa yang belajar di sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah siswanya kurang dari jumlah tersebut. Dari komponen/unsur yang mempengaruhi besaran

anggaran pada setiap satuan pendidikan, data keadaan sekolah dasar di Kabupaten Garut jumlah sekolah dasar sebanyak 1.566 unit, dapat menampung peserta didik berjumlah 299.284 orang terbagi dalam jumlah rombongan belajar sebanyak 10.896 rombongan, dari data tersebut rasio peserta didik dengan rombongan belajar 27 : 1. Banyaknya guru tetap pada sekolah dasar di Kabupaten Garut berjumlah 7.566 orang, berdasarkan data di atas jumlah rombongan belajar sebanyak 10.896 rombongan maka kekurangan guru di Kabupaten Garut berjumlah 3.330 orang.

Keadaan sekolah dasar di Kabupaten Garut tersebut sangat bervariasi, baik dilihat dari standar minimal guru maupun standar minimal keadaan murid, yang sangat berpengaruh terhadap standar pembiayaan yang akan digunakan pada satuan pendidikan. Mengacu pada data sekolah dasar di atas, sekolah dasar tersebut dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu Kelompok *pertama* sekolah dasar yang termasuk kategori di bawah standar yaitu sekolah dasar yang jumlah siswa pada rombongan belajarnya kurang dari standar. Kelompok *kedua* adalah Sekolah Dasar yang termasuk kategori memenuhi standar, yaitu Sekolah Dasar yang jumlah siswa pada rombongan belajarnya memenuhi standar. Artinya setiap rombongan belajar jumlah siswanya tidak kurang dari 28 orang siswa. Data tersebut dapat kami gambarkan pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Dari data tersebut tampak ketimpangan antara kelompok/kategori yang memiliki siswa di bawah standar dengan siswa yang di atas standar karena jumlah siswa dengan perhitungan besaran penerimaan BOS, merupakan gambaran atau menentukan besar kecilnya penerimaan bantuan tersebut.

Terjadinya ketimpangan tersebut karena perhitungan biaya harusnya berdasarkan kompleksitas program yang ada pada setiap sekolah. Apabila dilihat dari komponen kegiatan atau program antara sekolah yang satu dengan yang lainnya tidak hanya ditentukan oleh banyak siswa atau apa yang menjadi variabel yang mempengaruhi program tersebut terhadap besaran kegiatan/biaya tersebut.

Apabila dilihat dari persatuan pendidikan/sekolah, maka pada kategori satu berarti banyak sekolah yang muridnya dibawah standar, sedangkan pada kategori 2 akan banyak sekolah yang muridnya di atas standar. Hal itu mengakibatkan ketimpangan pada kelompok 1 akan kekurangan dana, sedangkan pada kategori 2 akan banyak sekolah yang dengan leluasa menggunakan dana. Gambaran variatif keadaan peserta didik pada masing-masing kategori sekolah dapat dilihat pada Tabel 3.

Dalam mencari informasi dampak dari kebijakan tersebut, metode yang digunakan dengan sampling dengan menggunakan cluster, yaitu dari 42 Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Garut, diambil sample sebanyak 11 Kecamatan.

Adapun dari 11 kecamatan, sekolah dasar yang dijadikan sample sebanyak: 132 sekolah dasar, dan dikelompokkan dalam 2 kelompok/kategori, yaitu kategori 1 yaitu kategori sekolah dasar yang memiliki jumlah peserta didik rata-rata perkelas di bawah standar per kelas (kurang dari 6 x 28), yaitu sekolah yang memiliki jumlah peserta didik 167 orang ke bawah, sedangkan kategori 2 Sekolah dasar yang memiliki jumlah peserta didik rata perkelas memenuhi standar (6 x 28), yaitu sekolah dasar yang jumlah peserta didiknya 168 orang keatas dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 1. Kategori Sekolah Dasar Berdasarkan Jumlah Siswa

No	Kategori Sekolah (Jumlah Siswa)	Jumlah Siswa Persekolah	Banyak SD	Banyak Siswa	Banyak Rombel	Rasio S : RB
1	Kategori 1 (Di bawah standar)	10 - 167	707	85.774	4.180	1 : 21
2	Kategori 2 Memenuhi Standar	168 - keatas	859	213.510	6.716	1 : 32
3	Jumlah /rata-rata		1.566	299.284	10.896	1 : 27

Sumber Data: Dinas Pendidikan Kab Garut

Tabel 2. Keadaan Guru Tetap, Rombel, dan Ruang Kelas

No	Kategori Sekolah	Guru Tetap	Rombongan Belajar	Ruang Kelas	Berdasarkan Rombongan Belajar		Berdasarkan Ruang Kelas	
					Angka	%	Angka	%
					1	Kategori 1	2.884	4.180
2	Kategori 2	4.682	6.716	5.449	2.034	30	767	14

Tabel 3. Keadaan Peserta Didik

No	Kategori Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah Sekolah	Jumlah SD	Jumlah Siswa
1	Kategori 1	10 sd 59	41	707	85.774
		60 sd 90	89		
		91 sd 120	171		
		121 sd 150	266		
		151 sd 167	140		
2	Kategori 2	168 sd 240	490	859	213.510
		241 sd 299	211		
		300 sd 399	115		
		400 sd 499	30		
		500 sd 989	13		
3	Jumlah			1.566	299.284

Tabel 4. Kelompok Kategori Sekolah Dasar

No	Kategori Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah Sekolah Dasar
1	Kategori 1	< 168 orang	47 SD
2	Kategori 2	168 orang – ke atas	85 SD
3	Jumlah		132 SD

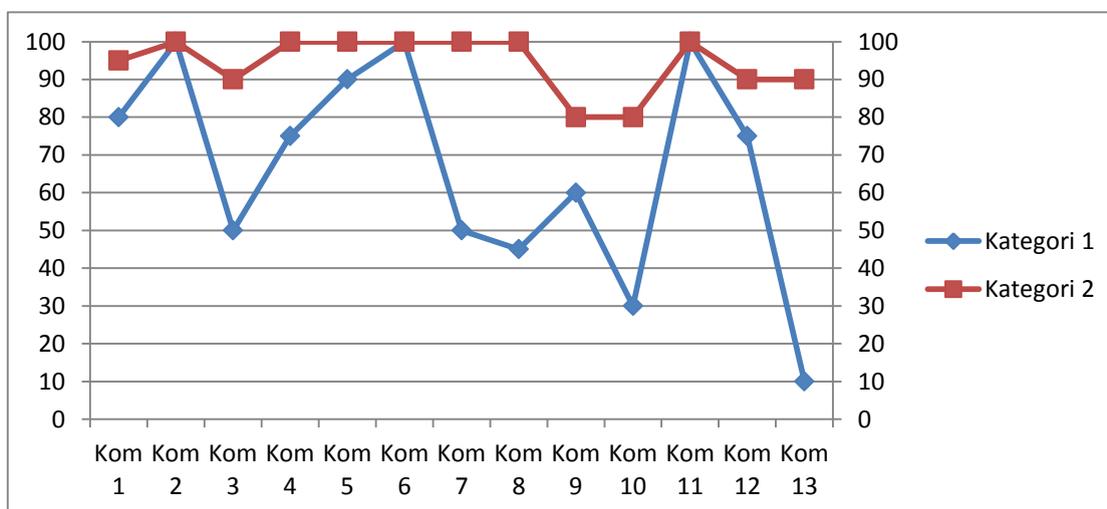
Dari komponen BOS yang pencapaian pemenuhan kebutuhan baik yang kategori 1 maupun kategori 2 adalah pengembangan perpustakaan, penerimaan peserta didik, kegiatan proses dan evaluasi pembelajaran, langganan daya dan jasa, pembiayaan pengelolaan, dan pembelian perangkat computer dan tata laksana. Sedangkan terjadi kesenjangan antara kelompok kategori 1 dan kategori 2 adalah perawatan sekolah, pembayaran tenaga/guru honorer, kegiatan ekstra kurikuler, pengembangan profesi guru, bantuan siswa miskin, dan pembelian barang baru. Ada-

pun pencapaian target/kebutuhan dapat dilihat pada Tabel 5 dan Gambar 3.

Tabel 5. Capaian target Komponen Layanan Pembelajaran

No	Komponen Program BOS	Capaian Program (%)	
		Kategori 1	Kategori 2
1	Pengembangan Perpustakaan	80	95
2	Penerimaan Peserta didik baru	100	100
3	Pembelajaran ekstra kurikuler	50	90
4	Kegiatan Ulangan/Ujian Sekolah	75	100
5	Kegiatan proses pembelajaran (barang habis pakai)	90	100
6	Langganan Daya dan Jasa	100	100
7	Perawatan gedung sekolah	50	100
8	Pembayaran honorarium tenaga/guru tidak tetap	45	100
9	Pengembangan profesi guru	60	80
10	Bantuan pada peserta didik miskin	30	80
11	Biaya Pengelolaan BOS dan Tatalaksana	100	100
12	Perawatan Komputer	75	90
13	Pemanfaatan sisa dana (Pembelian barang baru)	10	90

Dari 13 komponen tersebut, komponen yang memiliki ketimpangan adalah sebagai berikut (1) pembelajaran ekstra kurikuler, (2) perawatan sekolah, (3) pemberian honor guru/pegawai tidak tetap, (4) pengembangan profesi guru, (5) bantuan terhadap siswa miskin, dan (6) perawatan perangkat komputer dan alat tatalaksana lainnya.



Gambar 3. Grafik Perbedaan Pelayanan Sekolah Kategori 1 dan Kategori 2

Secara keseluruhan perbedaan tingkat pelayanan antara sekolah dasar kategori 1 dengan kategori 2 adalah 66,54% dengan 94,23% dari standar kebutuhan.

Pembahasan

Bantuan Operasional Sekolah pada dasarnya bantuan untuk melayani peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran, karena dalam hal ini pelayanan pembelajaran pada dasarnya membantu peserta didik, maka setiap peserta didik harus mendapatkan pelayanan yang sama, hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah melalui Peraturan Kemendiknas Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia, yang menentukan standar Bantuan Operasional (BOS) berdasarkan jumlah peserta didik yang ada pada satuan pendidikan. Besaran bantuan berdasarkan satuan siswa juga dikorelasikan dengan standar pelayanan minimal pendidikan, yaitu bahwa standar pelayanan minimal pembiayaan untuk sekolah dasar setiap rombongan belajar berjumlah 28 orang. Hal ini dibuktikan dalam hasil penelitian pada sekolah dasar kategori 2, rata-rata satuan pendidikan dapat melayani kebutuhan pembelajaran rata-rata 94,23%.

Di sisi lain, jumlah peserta didik pada setiap satuan pendidikan khususnya sekolah dasar tidak seluruhnya jumlah peserta didik memenuhi standar pembiayaan yaitu minimal 168 orang, maka kekurangan tersebut berpengaruh pada berkurangnya anggaran pendapatan sekolah, berkurangnya sumber pendapatan berpengaruh terhadap pelayanan pembelajaran hal ini terbukti pada pelayanan pembelajaran pada sekolah dasar kategori 2 pelayanan pembelajaran

yang hanya mencapai rata-rata 66,54%, hal ini sesuai dengan pendapat Mulyasa (2002) yang menegaskan bahwa bahwa biaya merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan, disamping itu membuktikan bahwa bantuan operasional sekolah pada satuan pendidikan tidak dapat ditentukan hanya satu variabel yaitu banyaknya siswa, tapi dipengaruhi juga oleh variabel lain berdasarkan jenis dan volume kegiatan, hal ini sesuai dengan pendapat Fattah (2008) bahwa dalam pembiayaan sekolah tidak ada pendekatan tunggal dan yang paling baik untuk pembiayaan semua sekolah karena kondisi tiap sekolah berbeda. Jadi, dalam hal ini tidak mungkin dalam menghitung anggaran sekolah disamaratakan berdasarkan perhitungan nasional.

Berdasarkan hasil perumusan dalam lokakarya penentuan besaran untuk unit sekolah tingkat SD/MI, standar kebutuhan dapat dibagi kedalam lima kelompok yang menggunakan variabel perhitungan yang berbeda, yaitu dengan menggunakan perhitungan per sekolah, persiswa/peserta didik, per ruang kelas, per rombongan belajar, dan per satuan orang. Adapun kelompok komponen dapat dirinci sebagai berikut. 1) Komponen yang memiliki standar minimal sama pada setiap sekolah (a) langganan daya dan jasa, (b) pengelolaan dana, pembelian alat kantor dan sparepart computer, (c) kegiatan ekstra kurikuler, (d) kegiatan pengembangan profesi guru. 2) Komponen yang dihitung *persiswa* (peserta didik). (a) Perpustakaan Sekolah, (b) Penerimaan Siswa baru, (c) kegiatan evaluasi ulangan, ujian, (d) bantuan terhadap siswa miskin. 3) Komponen yang dihitung berdasarkan per ruang kelas yaitu komponen perawatan gedung sekolah. 4) Komponen yang dihitung per rombongan

Tabel 6. Formulasi Standar Kebutuhan Biaya Operasional Sekolah

No	Dasar Perhitungan (variable)	Komponen Kegiatan	Standar Kebutuhan	Standar Cost
1	Per-Sekolah	Ekstra Kurikuler	Jumlah Kegiatan *)	Per-kegiatan
		Langganan Daya & Jasa	Jumlah pemakaian*)	
		Pengembangan Profesi guru	6 x Jumlah Mapel	Per-Kegiatan
		Pengelolaan BOS & TL	Rata-rata Kebutuhan	Per-Sekolah
2	Per-Siswa	Pengembangan Perpustakaan	10 % x Jml Siswa	R.Harga buku
		Penerimaan siswa Baru	1/6 x Jml Siswa	Per unit Siswa
		Ulangan dan Ujian Sekolah	Jumlah siswa	Per-unit Siswa
		Bantuan siswa miskin	10 % Jml Siswa	Per- unit Siswa
3	Per Ruang Kelas	Perawatan Bangunan Sekolah	Jumlah ruang kelas	Per-ruang kelas
4	Per-rombongan belajar	Barang habis pakai (Proses pembelajaran)	Jumlah rombongan belajar	Per-rombongan belajar
5	Per-orang	Pembayaran tenaga/guru honorer	Jumlah orang *)	Per- orang

*) ada pembatasan jumlah maksimal

belajar yaitu barang habis pakai yang digunakan untuk proses pembelajaran, 5) Komponen yang dihitung perorangan jumlah tenaga yaitu untuk pembayaran tenaga honorer.

Untuk komponen 13 (pemanfaatan sisa dana), tidak dicantumkan karena sifatnya insidental, dan bukan suatu keharusan. Adapun perhitungan volume dana yang dibutuhkan dapat dihitung pada Tabel 6.

Dasar perhitungan terdapat komponen yang jumlah kegiatan dibatasi, bahwa kegiatan tersebut maksimal sampai kebutuhan standar minimal sebagai contoh kebutuhan untuk guru di sekolah dasar minimal 6 orang kalau guru tetap ada 3 berarti kebutuhan maksimalnya 3 orang, sedangkan untuk ekstrakurikuler dan daya/jasa tergantung kepada kebijakan. Untuk kebutuhan pengembangan profesi guru sangat tergantung pada mata pelajaran dan tingkatan kelas (6 tingkat kelas). Sedangkan untuk kebutuhan Pengelolaan dana dan kebutuhan alat tulis kantor berdasarkan rata-rata kebutuhan sebelumnya berapa prosentase dari dana yang diterima. Untuk kebutuhan perpustakaan 10% dilihat dari tingkat keausan/kerusakan buku, sedangkan perhitungan anak miskin di tiap sekolah tergantung pada kebijakan.

DAFTAR RUJUKAN

Bastian. 2006, *Akuntansi Pendidikan*. Jakarta. Erlangga
Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat. (2001), *Pedoman Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di Jawa Barat*.
Dirjen Manajemen Dikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional, 2009, *Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*, Jakarta.
Fattah, N. 2008, *Pembiayaan Pendidikan Landasan Teori dan Studi Empiris*, Jurnal Pendidikan Dasar. (9) <http://jurnal.upi.edu/pendidikan-dasar/view/>

SIMPULAN

Penentuan besaran dana BOS dengan menggunakan jumlah peserta didik dalam pelayanan pembelajaran menimbulkan rasa keadilan karena setiap sekolah mendapatkan jumlah anggaran sesuai dengan jumlah sasaran pelayanan kegiatan yaitu jumlah siswa yang ada pada sekolah tersebut, hal ini terwujud pada sekolah yang jumlah siswanya memenuhi standar pelayanan minimal penganggaran.

Bagi sekolah yang memiliki jumlah peserta didik di bawah standar, mengakibatkan tidak tercapainya pelayanan secara maksimal karena kekurangan peserta didik berdampak terhadap kekurangan anggaran pendapatan sekolah, berkurangnya anggaran pendapatan berimplikasi pada pencapaian target kegiatan yang dalam hal ini tidak terpenuhinya pelayanan pembelajaran secara maksimal

Penentuan besaran dana Bantuan Operasional Sekolah pada satuan pendidikan harus berdasarkan kompleksitas program kegiatan yang ada pada setiap satuan pendidikan, tidak semua kegiatan dapat dihitung dengan menggunakan variabel/berbasis jumlah peserta didik.

108/pembiayaan-pendidikan: landasan-teori-dan-studi-empiris.html.

Mulyasa, E. *Manajemen Berbasis Sekolah* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Peraturan Pemerintah No 48 tahun 2008 Tentang *Pendanaan Pendidikan*.

Supriadi, D. 2004 *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, Rosda Bandung.

Undang -Undang No. 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.